

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

**COLLABORATIVE GOVERNANCE  
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDUNG  
(Studi Kasus di Pasar Induk Gedebage dan Pasar Caringin)**

Suhendra Prabowo<sup>1</sup>

Agus Subagyo<sup>2</sup>

Rira Nuradhawati<sup>3</sup>

*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*

Email Korespondensi :

***Abstract***

*This study analyzes the implementation of collaborative governance in waste management at Gedebage and Caringin traditional markets in Bandung City. Waste management has become one of the most complex urban governance challenges due to increasing waste generation, limited landfill capacity, and low levels of community participation. Using the collaborative governance model by Ansell and Gash (2008), this research explores the interaction among stakeholders—government, private sector, market managers, and the community—in managing market waste. The research employs a qualitative descriptive approach with data collected through interviews, field observations, and document analysis. The results reveal that collaborative processes have begun to take shape, with the local government acting as a facilitator rather than a sole regulator. However, challenges remain in building mutual trust, resource commitment, and shared understanding among stakeholders. The study concludes that effective collaboration in waste management requires not only regulatory frameworks but also continuous communication, transparency, and empowerment of local waste management groups to achieve sustainable urban governance.*

***Keywords: Collaborative Governance, Waste Management, Local Government, Bandung City, Market Governance***

**PENDAHULUAN**

Masalah persampahan merupakan isu klasik yang hingga kini belum terselesaikan secara tuntas di Kota Bandung. Sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk lebih dari 2,5 juta jiwa dan aktivitas ekonomi yang padat, produksi sampah mencapai lebih dari 1.500 ton per hari. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung tahun 2023, hanya sekitar 60% sampah yang berhasil terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, sementara sisanya masih dikelola

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

secara mandiri atau berakhir di lingkungan sekitar, termasuk sungai dan saluran drainase. Kondisi ini menimbulkan permasalahan lingkungan serius seperti pencemaran udara, bau tidak sedap, dan menurunnya kualitas sanitasi perkotaan.

Pasar tradisional menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap timbulan sampah organik di Kota Bandung. Dua pasar utama, yaitu Pasar Induk Gedebage dan Pasar Caringin, masing-masing menghasilkan lebih dari 25 ton sampah per hari, yang sebagian besar terdiri atas sisa sayuran, buah, dan limbah plastik kemasan. Meskipun pemerintah telah berupaya melakukan berbagai inovasi pengelolaan, antara lain dengan penerapan program Bandung Zero Waste City dan pembentukan bank sampah, upaya ini belum sepenuhnya berhasil karena lemahnya koordinasi dan kolaborasi antar pihak yang terlibat.

Permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di kedua pasar tersebut tidak hanya terletak pada aspek teknis pengumpulan dan pengangkutan, tetapi juga pada aspek tata kelola (governance), terutama dalam hal komunikasi, koordinasi, dan komitmen antar pihak. Pemerintah daerah, pengelola pasar, pelaku usaha, serta komunitas pedagang sering kali bekerja secara terpisah tanpa sinergi yang terarah. Hal ini menunjukkan lemahnya pola kolaboratif dalam penyelenggaraan layanan publik yang membutuhkan keterlibatan berbagai aktor.

Dalam konteks kebijakan publik modern, konsep Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) menawarkan pendekatan yang relevan untuk menjawab permasalahan tersebut. Pendekatan ini menekankan pentingnya kerja sama antara aktor pemerintah dan nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Kolaborasi dianggap mampu menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan melalui pembagian tanggung jawab dan kepercayaan bersama.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung, khususnya di Pasar Induk

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

Gedebage dan Pasar Caringin. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses kolaborasi antara pemerintah daerah, pengelola pasar, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam praktiknya.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya kajian tata kelola kolaboratif di sektor lingkungan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat model kemitraan multiaktor menuju pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

#### *Kerangka Teori*

Teori Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa kolaborasi merupakan suatu proses tata kelola di mana aktor publik dan nonpublik secara kolektif terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Kolaborasi memerlukan interaksi yang intensif, kepercayaan antar pihak, dan kesepahaman terhadap tujuan bersama. Model ini terdiri dari beberapa dimensi utama, yaitu Starting Conditions (kondisi awal), Facilitative Leadership (kepemimpinan fasilitatif), Institutional Design (desain kelembagaan), dan Collaborative Process (proses kolaborasi). Keempat dimensi ini menjadi alat analisis dalam menilai efektivitas kolaborasi antaraktor di lapangan.

Dalam konteks pengelolaan sampah, collaborative governance tidak hanya mengandalkan kapasitas pemerintah sebagai pengatur, tetapi juga menuntut keterlibatan aktif masyarakat, pelaku usaha, serta organisasi sosial. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menyediakan regulasi dan sumber daya, sedangkan masyarakat berkontribusi dalam pelaksanaan dan pengawasan. Kolaborasi yang baik mampu menciptakan inovasi pengelolaan sampah berbasis partisipasi, seperti pengelolaan sampah organik menjadi kompos atau pemilahan sampah di sumber.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

Model Ansell dan Gash menekankan bahwa kolaborasi yang berhasil selalu diawali dengan kondisi awal yang mendukung (starting condition) berupa kepercayaan, sejarah kerja sama yang positif, dan komitmen untuk terlibat. Selanjutnya, kepemimpinan fasilitatif diperlukan agar setiap pihak dapat bekerja dalam suasana saling menghormati dan terbuka. Desain kelembagaan menentukan struktur formal maupun informal yang memungkinkan kolaborasi berjalan efektif. Akhirnya, proses kolaborasi itu sendiri terjadi melalui komunikasi, negosiasi, dan adaptasi berkelanjutan.

Dengan demikian, teori ini relevan digunakan untuk menganalisis dinamika pengelolaan sampah di Kota Bandung yang melibatkan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup, PD Pasar Bermartabat, komunitas pedagang, serta pihak swasta yang bergerak dalam daur ulang sampah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam proses dan dinamika kolaborasi antaraktor dalam pengelolaan sampah pasar di Kota Bandung. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pejabat Dinas Lingkungan Hidup, pengelola PD Pasar Bermartabat, pengurus komunitas pedagang di Pasar Caringin dan Gedebage, serta pelaku usaha daur ulang.

Teknik analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2019) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan teknik, sementara interpretasi dilakukan dengan mengaitkan hasil empiris dengan teori Collaborative Governance. Penelitian ini dilakukan selama empat bulan dengan observasi langsung di kedua lokasi pasar, sehingga peneliti dapat memahami konteks sosial, hubungan antaraktor, dan proses kolaborasi yang terbentuk.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

## PEMBAHASAN

Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat dikenal sebagai salah satu kota metropolitan dengan tingkat urbanisasi yang tinggi. Pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan konsumsi masyarakat yang meningkat menyebabkan produksi sampah terus bertambah setiap tahun. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tahun 2023, volume sampah di Kota Bandung mencapai lebih dari 1.500 ton per hari, dan sekitar 15 persen di antaranya berasal dari sektor perdagangan, terutama pasar tradisional. Dua pasar terbesar yaitu Pasar Induk Caringin dan Pasar Gedebage menjadi lokasi penting penelitian ini karena keduanya merupakan pusat distribusi logistik dan bahan pangan untuk wilayah Bandung Raya.

Kedua pasar ini memiliki karakteristik yang berbeda. Pasar Caringin merupakan pasar tertua dan terbesar dengan struktur pengelolaan yang sudah mapan, sedangkan Pasar Gedebage relatif lebih baru dan masih dalam tahap pengembangan kelembagaan. Meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan Bandung Zero Waste City dan program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan), kenyataannya sebagian besar pedagang di kedua pasar masih belum memiliki kebiasaan memilah sampah. Sebagian besar sampah masih bercampur antara organik dan anorganik. Kondisi tersebut menjadi titik awal mengapa diperlukan model tata kelola kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

### 1) Dimensi *Starting Conditions*

Kondisi awal dalam penerapan kolaborasi sangat menentukan arah dan efektivitas proses kerja sama antaraktor. Menurut Ansell dan Gash (2008), starting condition mencakup tingkat kepercayaan antar pihak, sejarah hubungan sebelumnya, keseimbangan kekuasaan, serta sumber daya yang dimiliki masing-masing aktor. Dalam konteks Kota Bandung, kondisi awal kolaborasi di bidang pengelolaan sampah menunjukkan ketimpangan yang cukup besar antara pemerintah, pengelola pasar, dan masyarakat. Pemerintah memiliki posisi

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

dominan sebagai pembuat kebijakan dan penyedia sumber daya, sementara pedagang serta masyarakat di sekitar pasar masih berperan sebagai penerima kebijakan pasif.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Sampah DLH Kota Bandung mengungkapkan bahwa sebelum diterapkannya pendekatan kolaboratif, hubungan antara pemerintah dan komunitas pedagang cenderung formal dan bersifat top-down. Pemerintah memberikan instruksi, sedangkan pedagang hanya melaksanakan tanpa memahami tujuan kebijakan secara mendalam. Seiring berjalannya waktu, muncul kesadaran bahwa pola hubungan seperti ini tidak efektif dalam mendorong perubahan perilaku pengelolaan sampah di tingkat individu dan kelompok.

Observasi di lapangan memperlihatkan bahwa sebagian pedagang di Pasar Gedebage mulai berinisiatif memisahkan sampah organik dan anorganik dengan memanfaatkan wadah yang disediakan oleh pengelola pasar. Mereka juga menjalin kerja sama informal dengan bank sampah lokal untuk mendaur ulang plastik dan kardus. Namun, di Pasar Caringin, kesadaran seperti ini masih terbatas pada beberapa blok pasar yang aktif mengikuti kegiatan sosial dari DLH. Kondisi ini menunjukkan bahwa starting condition kolaborasi di kedua pasar berada dalam tahap awal yang heterogen.

Kesimpulan dari dimensi ini menunjukkan bahwa kolaborasi di Kota Bandung masih menghadapi kendala berupa rendahnya tingkat kepercayaan dan kesadaran bersama. Akan tetapi, munculnya inisiatif-inisiatif kecil dari komunitas pedagang menjadi indikasi positif bahwa peluang pembentukan kolaborasi jangka panjang terbuka lebar apabila difasilitasi dengan baik oleh pemerintah.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

## 2) Dimensi *Facilitative Leadership*

Kepemimpinan fasilitatif menjadi elemen penting dalam membangun dan mempertahankan kolaborasi antaraktor. Dalam pandangan Ansell dan Gash, pemimpin kolaboratif tidak berperan sebagai pengendali, melainkan sebagai penghubung yang menciptakan ruang komunikasi, membangun kepercayaan, dan memastikan proses dialog berlangsung inklusif. Dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Bandung, peran kepemimpinan fasilitatif dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan PD Pasar Bermartabat yang berperan sebagai mediator antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf PD Pasar Bermartabat, kepemimpinan fasilitatif diwujudkan melalui pembentukan *Forum Pasar Bersih* di Pasar Gedebage. Forum ini menjadi wadah komunikasi lintas sektor yang membahas jadwal pembersihan, pembagian tanggung jawab, dan rencana kegiatan daur ulang. Pemimpin forum berasal dari kalangan pedagang senior yang dihormati oleh anggota komunitas pasar, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kepemimpinan kolaboratif tidak hanya bergantung pada jabatan struktural, tetapi juga pada kepercayaan sosial.

Meskipun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif belum merata di seluruh blok pasar. Di Pasar Caringin, inisiatif dialog lebih sering muncul saat terjadi masalah seperti keterlambatan pengangkutan sampah atau bau yang mengganggu. Artinya, kepemimpinan masih bersifat reaktif, belum proaktif membangun pola komunikasi yang berkelanjutan. Selain itu, rotasi pejabat di lingkungan DLH sering menyebabkan terputusnya kesinambungan program kerja sama dengan komunitas pedagang.

Dengan demikian, kepemimpinan fasilitatif di Kota Bandung dapat dikategorikan cukup baik namun masih perlu diperkuat dengan mekanisme

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

kelembagaan yang menjamin keberlanjutan forum komunikasi. Pemimpin kolaboratif yang ideal harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan antaraktor sambil memotivasi partisipasi aktif tanpa mengedepankan posisi kekuasaan.

### 3) Dimensi *Institutional Design*

Desain kelembagaan merupakan faktor yang memastikan kolaborasi berjalan dalam kerangka aturan dan struktur yang jelas. Dalam teori Ansell dan Gash, desain kelembagaan mencakup regulasi, norma, serta mekanisme koordinasi yang mengatur peran masing-masing pihak. Pengelolaan sampah di Kota Bandung diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun, dalam praktiknya, desain kelembagaan masih bersifat hierarkis dan belum sepenuhnya mendukung model kolaboratif.

Hasil wawancara dengan pengelola Pasar Gedebage menunjukkan bahwa PD Pasar Bermartabat memiliki kewenangan terbatas dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sampah karena sebagian besar kebijakan tetap berada di tangan DLH. Akibatnya, fleksibilitas dalam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, seperti bank sampah atau lembaga daur ulang, menjadi terbatas. Kondisi ini berbeda dengan Pasar Caringin, di mana sudah ada MoU antara pengelola pasar dan komunitas pengumpul sampah yang memperbolehkan pemanfaatan area tertentu untuk kegiatan pemilahan.

Observasi lapangan menemukan adanya upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki desain kelembagaan dengan membentuk unit-unit pengelola kebersihan di setiap pasar. Unit ini bertugas mengoordinasikan kegiatan pembersihan, penimbangan, dan pengangkutan sampah. Namun, sebagian besar unit masih berfungsi administratif tanpa memiliki kapasitas teknis atau anggaran

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

sendiri. Akibatnya, koordinasi antarunit sering kali tidak berjalan efektif, terutama dalam hal pengawasan dan pelaporan.

Kesimpulan dari dimensi ini menunjukkan bahwa desain kelembagaan di Kota Bandung sudah memiliki dasar hukum yang jelas, namun implementasinya belum mendukung kolaborasi secara utuh. Diperlukan mekanisme kelembagaan baru yang memungkinkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta terakomodasi secara formal agar kolaborasi dapat berkelanjutan.

#### 4) Dimensi *Collaborative Process*

Proses kolaboratif merupakan inti dari model governance Ansell dan Gash, yaitu serangkaian aktivitas yang mencakup dialog, negosiasi, pembentukan kepercayaan, dan pencapaian hasil bersama. Dalam konteks Kota Bandung, proses kolaborasi pengelolaan sampah pasar berlangsung melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah inisiasi oleh pemerintah melalui sosialisasi dan pembentukan forum. Tahap kedua berupa pelaksanaan kegiatan bersama seperti pemilahan dan pengangkutan sampah. Tahap ketiga meliputi evaluasi dan umpan balik dari para pihak yang terlibat.

Berdasarkan wawancara dengan perwakilan komunitas pedagang di Pasar Gedebage, proses dialog yang dilakukan pemerintah berhasil meningkatkan kesadaran pedagang terhadap pentingnya pemilahan sampah di sumber. Pedagang merasa lebih dihargai karena dilibatkan dalam perencanaan, bukan hanya menerima instruksi. Komunikasi yang terbuka juga menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap kebersihan lingkungan pasar.

Observasi lapangan menunjukkan adanya perubahan perilaku nyata di beberapa blok pasar. Beberapa kios mulai menyediakan tempat sampah terpisah untuk organik dan anorganik, dan sebagian pedagang mengikuti kegiatan pelatihan pembuatan kompos yang diadakan oleh DLH bekerja sama dengan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

LSM lingkungan. Namun, tantangan tetap muncul dalam menjaga konsistensi perilaku ini, karena sebagian pedagang masih menganggap kegiatan memilah sampah memakan waktu dan mengganggu aktivitas jual beli.

Kesimpulan sementara dari dimensi ini menunjukkan bahwa proses kolaboratif di Kota Bandung telah menciptakan ruang partisipasi dan komunikasi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Namun, untuk mencapai kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan, diperlukan upaya peningkatan kapasitas, dukungan logistik, serta insentif yang mendorong perubahan perilaku secara permanen.

Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa penerapan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung, khususnya di Pasar Gedebage dan Pasar Caringin, telah menunjukkan adanya perubahan paradigma tata kelola dari yang bersifat hierarkis menjadi lebih partisipatif. Pemerintah daerah mulai berperan sebagai fasilitator yang membuka ruang komunikasi dan kerja sama lintas sektor, sementara masyarakat serta pelaku usaha menunjukkan kesediaan untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Kolaborasi yang terbangun antara aktor-aktor ini meskipun belum sempurna, telah menghasilkan sejumlah inovasi lokal seperti kegiatan pemilahan di sumber, kerja sama dengan bank sampah, dan program pelatihan pengolahan sampah organik menjadi kompos.

Namun demikian, dinamika kolaborasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Secara struktural, belum adanya mekanisme kelembagaan permanen yang menjamin keberlanjutan forum kolaborasi membuat kegiatan sering bergantung pada figur tertentu. Sementara secara kultural, rendahnya kesadaran sebagian pedagang terhadap pentingnya pengelolaan sampah serta persepsi bahwa kebersihan adalah tanggung jawab pemerintah menjadi hambatan yang cukup signifikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

ditentukan oleh struktur kelembagaan, tetapi juga oleh kualitas interaksi sosial dan nilai kepercayaan antar pihak yang terlibat.

Dengan demikian, kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Bandung dapat dikatakan telah berada pada fase transisi menuju kematangan kelembagaan. Kolaborasi ini memperlihatkan potensi besar untuk berkembang menjadi model tata kelola lingkungan yang berkelanjutan jika didukung dengan regulasi yang adaptif, kepemimpinan yang konsisten, serta partisipasi masyarakat yang terus ditingkatkan. Proses ini juga menjadi contoh nyata penerapan prinsip *good governance* berbasis partisipasi publik dalam konteks pengelolaan lingkungan perkotaan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung, terutama di Pasar Gedebage dan Pasar Caringin, telah menunjukkan arah yang positif meskipun belum sepenuhnya optimal. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan PD Pasar Bermartabat berperan sebagai penggerak utama dalam menciptakan forum komunikasi lintas sektor yang melibatkan komunitas pedagang, pelaku usaha, serta lembaga sosial lingkungan. Hasilnya, muncul berbagai inisiatif pengelolaan sampah berbasis partisipasi yang mulai mengubah perilaku masyarakat pasar dalam menjaga kebersihan dan memanfaatkan limbah secara produktif.

Namun demikian, keberhasilan kolaborasi ini masih menghadapi sejumlah kendala seperti rendahnya tingkat kepercayaan antaraktor, keterbatasan sumber daya finansial dan teknis, serta belum adanya kelembagaan permanen yang mengatur pola kerja sama lintas sektor. Dalam beberapa kasus, koordinasi antar lembaga juga belum berjalan secara sinkron sehingga berdampak pada tidak konsistennya program pelaksanaan di lapangan. Kendati demikian, penelitian ini menegaskan bahwa semangat kolaboratif telah tumbuh dan menjadi dasar penting bagi transformasi pengelolaan sampah menuju sistem yang lebih adaptif dan partisipatif.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan Ansell dan Gash (2008) bahwa kolaborasi yang efektif membutuhkan kondisi awal yang mendukung, kepemimpinan fasilitatif yang mampu menjembatani kepentingan, desain kelembagaan yang inklusif, serta proses kolaborasi yang berkelanjutan. Secara praktis, pengalaman Kota Bandung menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dapat menjadi solusi alternatif dalam penanganan masalah lingkungan yang kompleks di perkotaan, asalkan disertai dengan dukungan regulasi, komitmen politik, dan keterlibatan masyarakat secara aktif.

## **SARAN**

Pemerintah Kota Bandung disarankan untuk membentuk Forum Kolaborasi Pengelolaan Sampah Pasar yang memiliki legalitas formal dan menjadi wadah koordinasi lintas sektor secara permanen. Forum ini dapat berfungsi sebagai ruang dialog, perencanaan, dan evaluasi kebijakan yang melibatkan seluruh aktor dari unsur pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Peningkatan kapasitas teknis bagi pengelola pasar, petugas kebersihan, dan komunitas pedagang perlu menjadi prioritas agar kolaborasi tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar mampu menghasilkan perubahan perilaku dan sistem kerja yang efisien.

Dari sisi kebijakan, pemerintah perlu meninjau kembali desain kelembagaan yang terlalu birokratis dan mendorong desentralisasi pengelolaan sampah di tingkat pasar. Insentif ekonomi, seperti pemberian penghargaan bagi pasar bersih atau kompensasi bagi pengelola yang berhasil mengurangi timbulan sampah, dapat menjadi strategi untuk memperkuat motivasi kolaboratif. Selain itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji efektivitas model kolaborasi ini di sektor lingkungan lainnya, sehingga dapat dirumuskan kerangka governance yang lebih komprehensif dalam mendukung pembangunan perkotaan berkelanjutan di Indonesia.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

**REFERENSI**

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2023). *Kota Bandung dalam Angka 2023*. Bandung: BPS.
- Bappelitbang Kota Bandung. (2023). *Laporan Kinerja Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandung Tahun 2023*. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. (2023). *Laporan Pengelolaan Sampah Perkotaan Tahun 2023*. Bandung: DLH.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Farida, N., & Rahman, R. (2021). Collaborative waste management in Indonesia: Challenges and governance models. *Journal of Environmental Management and Policy*, 15(2), 101–118. <https://doi.org/10.1016/j.jempol.2021.05.004>
- Hakim, A., & Wibisono, H. (2022). Kolaborasi multi-aktor dalam pengelolaan sampah di wilayah perkotaan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 55–73. <https://doi.org/10.23960/jakp.v7i1.2022>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nurhadi, A., & Yuliani, D. (2022). Collaborative governance approach in urban waste management: A case from Bandung City, Indonesia. *Asian Journal of Public Affairs*, 14(2), 42–58. <https://doi.org/10.1177/ajpa.v14i2.2022>
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2020). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rahmadani, T., & Satria, D. (2022). Collaborative governance in urban waste management: Lessons from Indonesian cities. *International Journal of Public Policy Studies*, 10(2), 65–83. <https://doi.org/10.1016/ijpps.10.2.65>

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

- 
- Riyadi, A., & Prakoso, F. (2021). Kolaborasi multiaktor dalam pengelolaan sampah perkotaan di era desentralisasi. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Daerah*, 5(1), 45–60. <https://doi.org/10.24815/jtkpd.v5i1.2021>
- Sari, M., & Putra, Y. (2023). Evaluating collaborative public management in Indonesia's waste policy: The role of local leadership. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 9(3), 177–195. <https://doi.org/10.31227/jkpi.v9i3.2023>
- Setiawan, B., & Kartasasmita, G. (2023). Kolaborasi dan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. *Jurnal Birokrasi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 77–93. <https://doi.org/10.33021/jbcp.v11i2.2023>
- Suryani, L., & Nugroho, S. (2024). Governance innovation in waste management: Collaborative frameworks for sustainable cities. *Environmental Policy and Urban Studies*, 18(1), 33–49. <https://doi.org/10.1016/epus.2024.01.004>
- Wibisono, H., & Nugraha, S. (2023). Public participation and collaborative policy in solid waste management. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi*, 11(3), 121–138. <https://doi.org/10.33021/jkpa.v11i3.2023>
- Yuliana, D., & Prakoso, F. (2022). Smart governance and citizen participation in Indonesia's urban areas. *Journal of Local Government Studies*, 28(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/02696430.2022.1991447>